



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**DRAFT SKRIPSI**

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal  
Terhadap PDRB (Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat)**

*Oleh*

**ANGGUN RANGGA WARDHANA  
06151073**

**Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas  
PADANG  
2011**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pemerintah daerah sebagai satuan yang diberi wewenang untuk mengatur diri sendiri sesuai otonomi daerah, tentu saja membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Namun, pemerintah pusat tidak dapat memberikan semua pembiayaan kepada daerah, maka kepada daerah dibebankan kewajiban dan wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri. Untuk itu pemerintah daerah harus mempunyai penerimaan yang berkesinambungan, dalam arti kata harus ada dana yang selalu diharapkan masuk ke kas daerah untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan (Suparmoko, 1997).

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang

di daerah. UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik.

Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan memengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah yaitu hanya sebesar kurang dari 20 % seperti dapat dilihat pada lampiran Anggaran Belanja Daerah sedangkan anggaran belanja yang tertinggi adalah anggaran belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50 % setiap tahunnya dari total anggaran belanja.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya seperti terlihat dalam lampiran dimana belanja modal hanya mendapatkan persentase sebesar 7,68 % dari total PAD pada tahun 2006.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis tidak memasukkan faktor DAK sebagai variabel independen yang mempengaruhi anggaran belanja modal.

Dari latar belakang diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum seharusnya berpengaruh terhadap belanja modal. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan penggunaan rentang periode 15 tahun, untuk membuktikan konsistensi bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum seharusnya berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk menuangkan ini dalam sebuah skripsi dengan judul ***“Pengaruh Dana Alokasi Umum Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap PDRB di Sumatera Barat.”***

## **1.2 Perumusan Masalah**

Pentingnya belanja modal untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah

Daerah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap PDRB?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap PDRB?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap PDRB?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap PDRB
2. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap PDRB.
3. Pengaruh belanja modal terhadap PDRB.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.
2. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai pengaruh, PAD, anggaran belanja modal dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **1.5 Hipotesa**

Dalam penulisan ini terdapat hipotesa diantaranya :

1. Diduga pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di provinsi sumatera barat.
2. Diduga terdapat hubungan yang positif antara, Dana Alokasi Umum, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

### **1.6 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam pembahasan tentang pengalokasian anggaran belanja modal di Provinsi Sumatera Barat dengan melihat dan mempertimbangkan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum di Provinsi Sumatera Barat

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka ada pembatasan penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian dilakukan terhadap data PRDB provinsi Sumatera Barat selama periode pengamatan dari tahun 1995 - 2009.
- b. Penelitian dilakukan terhadap data Pendapatan Asli Daerah provinsi Sumatera Barat selama periode pengamatan dari tahun 1995 - 2009.
- c. Penelitian dilakukan terhadap data Dana Alokasi Umum di provinsi Sumatera Barat selama periode pengamatan dari tahun 1995 - 2009.
- d. Penelitian dilakukan terhadap data Anggaran Belanja Modal di provinsi Sumatera Barat selama periode pengamatan dari tahun 1995 - 2009.



- e. Jangka waktu penelitian adalah 15 tahun dari tahun 1995 sampai dengan 2009.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika pembahasan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan.

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, ruang lingkup, serta sistematika pembahasan.

**BAB II** : Kerangka Teori

Bab ini membahas tentang kerangka teori yang digunakan dalam pembahasan, serta penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan literatur dalam peninjauan ini.

**BAB III** : Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang metode analisis data dan sumber data yang digunakan

**BAB IV** : Gambaran Umum Perkembangan Anggaran Belanja daerah Provinsi Sumatera Barat

**BAB V** : Hasil Dan Pembahasan

Berisi hasil penelitian dan pembahasan serta implikasi kebijakan dari penelitian yang dilakukan

## BAB VI : Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat diambil terhadap analisa yang telah dilakukan serta saran-saran yang merupakan masukan baik bagi industri maupun pemerintah.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Anggaran Daerah Sektor Publik**

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting karena di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan *input* dan *output* dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran. Proses pembuatan keputusan pengalokasian belanja modal menjadi sangat dinamis karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda (Rubin, 1993).

Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan, yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian

anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuel, 2000). Sedangkan menurut Von Hagen (2005) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

### **2.1.2. Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia**

Perubahan paradigma baru dalam pengelolaan dan penganggaran daerah merupakan hal yang tak dapat dipisahkan sebagai akibat penerapan otonomi daerah di Indonesia. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Pembahasan anggaran dilakukan eksekutif dan legislatif dengan membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui *bargaining* dengan mengacu pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran, sebelum anggaran ditetapkan menjadi suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan menjadi acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam pertanggungjawaban kepala daerah.

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan

Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja modal (*capital expenditure*) merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, anggaran belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001). Sesuai aturan APBD dan tujuan otonomi daerah, bahwa hakekat Anggaran Daerah adalah merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus benar-benar menggambarkan perangkaan

ekonomis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan masalahnya dan meningkatkan kesejahteraannya.

### **2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi**

#### **A. Definisi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 1994). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, 2000).

Menurut Zaris (1987) pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto per kapita (PDRB per kapita). Samuelson (1995) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari *Gross Domestic Product* potensial/output dari suatu negara. Ada 4 faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi :

#### **a. Sumber daya manusia.**

Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hampir semua faktor produksi yang lainnya, yakni barang modal, bahan mentah serta teknologi,

bisa dibeli atau dipinjam dari negara lain. Tetapi penerapan teknik-teknik produktivitas tinggi atas kondisi-kondisi lokal hampir selalu menuntut tersedianya manajemen, ketrampilan produksi, dan keahlian yang hanya bisa diperoleh melalui angkatan kerja terampil yang terdidik.

b. Sumber daya alam.

Faktor produksi kedua adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang penting antara lain minyak-minyak gas, hutan air dan bahan-bahan mineral lainnya.

c. Pembentukan modal.

Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi.

d. Perubahan teknologi dan inovasi.

Salah satu tugas kunci pembangunan ekonomi adalah memacu semangat kewiraswastaan. Perekonomian akan sulit untuk maju apabila tidak memiliki para wiraswastawan yang bersedia menanggung resiko usaha dengan mendirikan berbagai pabrik atau fasilitas produksi, menerapkan teknologi baru, menghadapi berbagai hambatan usaha, hingga mengimpor berbagai cara dan teknik usaha yang lebih maju (Samuelson, 1995).

Menurut Sukirno (1994) bahwa istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan dari suatu perekonomian, sedangkan dalam analisis makro ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara.

Menurut Boediono (1992) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi disini meliputi 3 aspek yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomis) suatu perekonomian berkembang, berubah dari waktu ke waktu.
2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada 2 aspek penting yaitu output total dan jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk.
3. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu jangka panjang. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka panjang waktu yang cukup lama (5 tahun) mengalami kenaikan output.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa istilah pertumbuhan ekonomi berbeda dengan istilah pembangunan ekonomi. Menurut Suryana (2000) menerangkan bahwa pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi ini mengandung tiga unsur yaitu :



- a. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.
- b. Usaha meningkatkan pendapatan perkapita.
- c. Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Sumitro Djojohadikusumo (2004), pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi tersebut jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian :

- a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus.
- b. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita.
- c. Kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
- d. Perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). Sistem ini bisa di tinjau dari dua aspek yaitu : aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi (baik legal formal maupun informal)

### **2.1.2 Model pertumbuhan ekonomi**

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-daerah, benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Dan keseluruhan

pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan di dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Tujuan pembangunan yang sedang dilaksanakan mencakup sasaran seperti : *Pertama*, dalam usaha meratakan pembangunan di seluruh daerah, sekaligus untuk menghindari terjadinya jurang perbedaan tingkat pembangunan antar daerah yang semakin dalam. *Kedua*, pengarahan dalam kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan aspirasi dan potensi yang terdapat di daerah, baik bagi kepentingan perkembangan nasional maupun bagi kepentingan daerah sendiri. *Ketiga*, mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar terjalin ikatan-ikatan (ekonomi) antar daerah yang kuat di dalam satu rangka kesatuan ekonomi nasional yang kokoh. *Keempat*, membina daerah-daerah minus, daerah perbatasan, dan tanah-tanah kritis, dengan program-program khusus (Sanusi, 1987).

### **2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB merupakan penjumlahan dari semua harga dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara penghitungan.

Ketiga cara tersebut adalah :

1. Cara Pengeluaran.

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut. Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi dan pengeluaran pemerintah serta pendapatan ekspor dikurangi dengan pengeluaran untuk barang-barang impor.

2. Cara Produksi atau cara produk netto.

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara produksi yang dijumlahkan hanyalah nilai produksi tambahan atau *value added* yang diciptakan.

3. Cara Pendapatan.

Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. (Sukirno, 1994).

Adapun manfaat penghitungan nilai PDRB adalah :

1. Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian. Dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah termasuk daerah industri, pertanian atau jasa dan berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya.
2. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, maka akan di dapat catatan angka dari tahun

ke tahun. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan apakah ada perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak.

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **2.1.6 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara perlu diprioritaskan karena diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional.

Menurut Halim (2001), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri:

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar Pemerintah daerah dan membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Menurut Halim (2001) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah.

Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak hotel,
- 2) Pajak restoran,
- 3) Pajak hiburan,
- 4) Pajak reklame,
- 5) Pajak penerangan jalan,
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
- 7) Pajak Parkir.

b. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD.
- 3) Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.

- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Abdullah dan Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004).

Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk

menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembanguna yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

#### **2.1.7 Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dengan leluasa dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau untuk keperluan lain.

Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari



Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

## **2.2 Studi Literatur**

Bambang Brodjonegor (2001) mengungkapkan bahwa adanya bagi hasil sumber daya alam tak terhindarkan menghasilkan disparitas anggaran pemerintah daerah lebih tinggi dan jauh lebih tinggi. Hal ini berarti terjadi suatu disparitas pendapatan daerah. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang seharusnya mengurangi masalah kronis kesenjangan regional di Indonesia. Menurut undang-undang 25/1999, dana alokasi umum ditunjuk untuk menjadi memberikan pemerataan fiskal dengan jumlah total minimal 25% dari pendapatan dalam negeri bersih. Dari jumlah itu, 10% akan didistribusikan untuk semua provinsi sedangkan 90% untuk semua kabupaten. Bagian penting dari dana ini bukan tentang jumlah tetapi pada rumus untuk mendistribusikan jumlah tersebut. Kriteria dari rumus digambarkan dalam hukum 25/1999 di mana formula harus menekankan baik kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan fiskal daerah. Kedua kriteria kemudian membuat gagasan kesenjangan fiskal atau perbedaan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Idealnya, pemerintah daerah dapat memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya karena mereka adalah tanggung jawab pemerintah daerah.

Halim (2001) dalam Kuncoro (2004) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk

menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kuncoro (2004) menjelaskan beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan otonomi, yaitu (1) dominannya transfer dan pusat, (2) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), (3) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, (4) kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, (5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Levine (1997) mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi menciptakan permintaan untuk jenis pengaturan keuangan tertentu, dan sistem keuangan secara otomatis untuk merespon tuntutan tersebut. Selain itu, beberapa ekonom tidak percaya bahwa hubungan keuangan-pertumbuhan adalah penting. Bahkan ada bukti bahwa tingkat perkembangan keuangan adalah prediksi yang baik dari tingkat pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang, akumulasi modal, dan perubahan teknologi mempengaruhi kecepatan dan pola pembangunan ekonomi.

Darwanto dan Yulia Yustikasari (2006) menyatakan Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Anita Rokhmawati (2009) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Propinsi Jawa Timur yang diukur dengan Produk Domestik Regional Produk (PDRB). Data yang digunakan adalah laporan realisasi APBD seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur selama periode 2003-2006. Dalam penelitian ini menggunakan sensus (seluruh populasi dijadikan sampel penelitian) dengan jumlah populasi 38 kabupaten dan kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Metode statistik yang digunakan adalah *analysis path* (analisis jalur).

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil analisis jalur yaitu: (1) Belanja Modal berpengaruh positif secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah, (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, (3) Belanja Modal berpengaruh positif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, (4) Belanja Modal berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu bagi pemerintah daerah agar lebih mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap seperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Alokasi belanja modal yang

dialokasikan pemerintah daerah sebaiknya lebih didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik dan pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif,

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi dimana data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan. Sumber dan penggunaannya dengan data statistik yang didapat dari data eksternal yaitu data

yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Sifat datanya adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka, dan bersifat obyektif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain.

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah :

1. Data Laporan Realisasi APBD tahun 1995-2009, yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik mengenai jumlah realisasi Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

### **3.2. Pembentukan Model**

Penelitian ini menggunakan metode statistika untuk keperluan estimasi. Dalam metode statistika alat analisis yang biasa di pakai dalam khasanah penelitian adalah analisis regresi. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi atas ketergantungan suatu variabel yaitu variabel yang tergantung pada variabel yang lain yang di sebut dengan variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dengan meramalkan nilai populasi berdasarkan nilai tertentu dari variabel yang di ketahui (Gujarati 1996).

Penelitian ini akan menggunakan persamaan regresi linear berganda dan di transformasikan dalam bentuk logaritma dengan menggunakan kuadrat terkecil dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

(Friska, 2009)

Keterangan :

Y = PDRB

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Dana Alokasi Umum (DAU).

X3 = Belanja Modal

$\alpha$  = Konstanta

$\varepsilon$  = error

### **3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terjadi selama periode 1995-2009, agar penelitian ini terarah dan tidak menimbulkan salah penafsiran, maka perlu dikemukakan beberapa konsep dan definisi yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Variabel-variabel yang dipelajari dalam penelitian ini adalah:

1. Dependent Variabel (Y)

Variable Dependen adalah variable yang diterangkan atau dipengaruhi.

Disini variabel terikat yang digunakan dalam model ini adalah PDRB.

## 2. Independent Variabel

Variable independent adalah suatu variable yang dianggap menerangkan atau mempengaruhi perubahan-perubahan pada variable dependen dimana biasanya terletak pada sisi kanan dari suatu persamaan yang ditaksir. Disini variable independennya adalah :

### a. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### b. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS).

### c. Belanja Modal.

Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset). Belanja Modal/Pembangunan terdiri dari belanja modal tanah; belanja modal jalan dan jembatan; belanja modal bangunan air (irigasi); belanja modal instalasi; belanja modal jaringan;

belanja modal bangunan gedung; belanja modal monument; belanja modal alat-alat besar; belanja modal alat-alat angkutan; belanja modal alat-alat bengkel; belanja modal alat-alat pertanian; belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga; belanja modal alat-alat studio; belanja modal alat-alat komunikasi; belanja modal alat-alat kedokteran; belanja modal alat-alat laboratorium; belanja modal buku/perpustakaan; belanja modal barang bercorak kesenian dan kebudayaan; belanja modal hewan, ternak serta tanaman; dan belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan.

### **3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Metode analisis data merupakan metode yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis, data diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dimana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data dan uji asumsi klasik.

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai PAD, Dana Alokasi Umum, serta PDRB Kabupaten/Kota Sumatera Barat . Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan teknik analisa linear berganda dengan panel data (*time series dan cross section*).

### **3.5 Uji Statistik**

Selanjutnya untuk mengetahui dan menguji hasil-hasil regresi, maka digunakan beberapa metode pengujian statistik yaitu :

1. Determinasi



Besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (semakin besar kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen (semakin kecil kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen) Besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial dilihat dari besarnya determinasi parsial ( $R^2$ ) (Algifari, 2000).

Rumus yang dipakai adalah:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2}$$

## 2. Uji t-test

Digunakan untuk menguji keberartian dari koefisien yang diperoleh, jika nilai t yang dicari lebih besar dari nilai t yang ada dalam tabel, berarti  $H^0$  ditolak dan  $H^1$  diterima, dengan kata lain memang terdapat hubungan yang berarti antara variabel independent dengan variabel dependen.  $H_0$  adalah hipotesis nol, yaitu hipotesis yang akan diuji nantinya akan diterima atau ditolak,  $H^1$  merupakan hipotesis alternatif.

Pengujian t-test atau t hitung ini dilakukan untuk masing-masing variabel dimana pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$t - test = \frac{b_i}{S_e(b_i)}$$

Dimana:

$b_i$  = koefisien korelasi ke t

$S_e(b_i)$  = standar error dan koefisien korelasi

Nilai t-hitung yang selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Apabila t-hitung yang diperoleh lebih besar dari t-tabel, maka hipotesa nol ditolak dan hipotesa alternatif diterima serta ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Sedangkan apabila t-hitung lebih kecil dari t-tabel maka hipotesa nol diterima dan hipotesa alternative ditolak, tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut.

## 2. Uji F-test

Pengujian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara keseluruhan. Hasil pengujian ini juga akan dibandingkan dengan nilai yang ada pada F-tabel.

Perhitungannya dengan menggunakan rumus:

$$F - test = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Dimana:

$R^2$  = Koefisien Determinasi

$k$  = Jumlah Variabel

$n$  = Jumlah observasi

$k-1$  =  $v_1$  (degrees of freedom numerator)

$n-k$  =  $v_2$  (degrees of freedo denominator)

Dari hasil perhitungan yang dilakukan, apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel berarti keseluruhan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya apabila F-hitung lebih kecil dari F-tabel berarti pengaruh gabungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1 Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat**

##### **4. 1. 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB merupakan penjumlahan dari semua harga dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Dari data yang saya dapatkan dari BPS tentang PDRB Sumatera Barat dari

Tahun 2000 – 2009 dapat dilihat bahwa PDRB Sumatera Barat dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan.

Perkembangan PDRB di Sumatera Barat secara lengkapnya dapat dilihat di bawah ini :

Table 4.1 Perkembangan PDRB Sumatera Barat Tahun 2000-2009  
(Ribuan Rupiah)

Tahun	PDRB
2000	22.889.614,05
2001	23.727.373,93
2002	24.840.187,76
2003	26.146.781,63
2004	27.574.395,92
2005	29.159.480,57
2006	30.949.945,90
2007	32.912.968,59
2008	35.007.921,57
2009	36.464.582,69

#### 4. 1. 2. Dana Alokasi Umum (PAD)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah

daerah dengan leluasa dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau untuk keperluan lain.

Selama periode 2000-2009, komponen dana perimbangan kabupaten/kota Propinsi Sumatera Barat yang terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Secara umum dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum di Sumatera Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 4.1 Perkembangan DAU Sumatera Barat Tahun 2000-2009  
(Ribuan Rupiah)

Tahun	Dana Alokasi Umum
2000	185.472,41
2001	227.682
2002	193.520
2003	230.957,18
2004	234.249
2005	350.763,27
2006	477.029
2007	546.332
2008	631.675,94
2009	648.943,12

#### 4. 1. 3 Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah sendiri. Glynn Cochrane pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Secara umum, realisasi PAD riil Propinsi Sumatera Barat selama periode 2000-2009 selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Table 4.1 Perkembangan PAD Sumatera Barat Tahun 2000-2009  
(Ribuan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2000	85.157
2001	140.763
2002	197.461
2003	264.852
2004	379.028
2005	481.095,72
2006	494.929,54
2007	273.733,09
2008	636.224,68
2009	739.747,09

#### 4. 1. 4 Belanja Modal.

Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi atau penambahan aset. Belanja modal dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana daerah.

Data tentang Belanja Modal pada tahun 2000-2009 di Sumatera Barat :

Table 4.1 Perkembangan Belanja Modal Sumatera Barat Tahun 2000-2009  
(Ribuan Rupiah)

Tahun	Belanja Modal
-------	---------------

2000	96.137,88
2001	103.862,71
2002	119.742,57
2003	127.538,63
2004	150.408,39
2005	164.765,08
2006	195.097,98
2007	273.733,25
2008	383.078,05
2009	462.031,79